

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2020 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005 – 2025;
2. Rancangan RKP TAHUN 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2015 – 2019;
3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020;
4. Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional;
5. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
6. Memperhatikan usulan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1). Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- (2). Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- (3). Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
- (4). Korelasinya terhadap isu strategis daerah

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan telah memasuki tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

**" TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA
MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA "**

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Balangan yang maju juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2016- 2021, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun 2020, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
- f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2020 yang berpedoman pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020

| Tujuan | Sasaran |
|--|--|
| Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia | Meningkatkan kualitas pendidikan Meningkatkan kualitas kesehatan Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja |
| Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat | Meningkatnya kinerja perekonomian daerah Meningkatnya nilai investasi Meningkatnya Usaha Mikro (UM) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat |
| Meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk pengembangan wilayah dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi Meningkatnya kualitas infrastruktur air minum, sanitasi dan perumahan Meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi internet |
| Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan | Meningkatnya pendapatan petani Meningkatnya mutu lingkungan hidup |
| Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat | Menurunkan angka kemiskinan Meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatnya kemampuan tanggap darurat bencana Meningkatnya pelestarian budaya |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terdapatnya pemerintahan baik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Meningkatnya penyelenggaraan kinerja daerah Meningkatnya kualitas pemerintahan desa |
| Terciptanya suasana masyarakat yang kondusif | Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat |

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

4.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2020

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8- 5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Sasaran dan prioritas pembangunan nasional mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.

- e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - e. Pengentasan kemiskinan.
 - f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
 - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
 - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
 - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
 - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
 - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
 - b. Mempercepat transformasi struktural.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
 - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
 - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
 - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
 - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
 - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
 - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
 - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
 - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
 - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.

4.2.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 yaitu “**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing**”. Berdasarkan visi dan elemen pendukung tersebut ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016- 2021 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;

5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Program-program yang mendukung Akselerasi dan pencapaian visi pembangunan Kalimantan selatan, yaitu KALSEL MAPAN (mandiri dan terdepan) lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari dan berdaya saing. Agar pembangunan Kalimantan Selatan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan. Adapun 13 prioritas daerah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut antara lain:

1. Prioritas Kalsel Cerdas, dengan sasaran untuk mencapai angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang lebih baik
2. Prioritas Kalsel Sehat, dengan sasaran meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi
3. Prioritas Kalsel Terampil, dengan sasaran menekan angka pengangguran
4. Prioritas Kalsel Beriman, dengan sasaran meningkatkan lulusan sma/ma yang khatam al-quran
5. Prioritas Kalsel Pemda Berkinerja Baik, dengan sasaran mendapatkan nilai LAKIP A, opini BPK WTP dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
6. Prioritas Kalsel Berbudaya, dengan sasaran melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya daerah melalui festival budaya yang bertaraf nasional dan internasional
7. Prioritas Kalsel Aman, dengan sasaran tidak terjadi konflik sosial dan menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
8. Prioritas Kalsel Menuju Tuan Rumah PON, dengan sasaran kalsel sebagai tuan rumah penyelenggara pon tahun 2024
9. Prioritas Kalsel Dengan Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
10. Prioritas Kalsel Sentra Pangan, dengan sasaran meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, meningkatkan produksi daging dan ikan
11. Prioritas Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional, dengan sasaran meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, kenaikan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara

12. Prioritas Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan dan Jasa, dengan sasaran meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian dan perdagangan
13. Prioritas Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas, dengan sasaran meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas udara dan indeks kualitas air

Adapun Rencana Pembangunan di tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah merumuskan tema, yaitu: "**Memacu Daya Saing Perekonomian yang Didukung SDM Berkualitas**". Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 4 (empat) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 Peningkatan Kualitas SDM , dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Penurunan Prevalensi Stunting
 - c. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - d. Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - e. Peningkatan Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat
 - f. Pemenuhan SPM Disabilitas dan Tuna Sosial
2. Prioritas 2 Peningkatan Daya Saing Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kemandirian Pangan
 - b. Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian
 - c. Peningkatan Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
 - d. Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata
 - e. Peningkatan Nilai Investasi
 - f. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
 - g. Peningkatan Penanganan Pra & Pasca Bencana
 - h. Peningkatan Daya Dukung SDA & Daya Tampung Lingkungan
3. Prioritas 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - b. Penguatan SAKIP
 - c. Pelaksanaan Pilkada KALSEL
 - d. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

4. Prioritas 4 :Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mendukung Perekonomian Untuk Pemerataan Pembangunan

4.2.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2020 adalah ***“ Pengembangan Infrastruktur Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat ”.***

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 5 (Lima) Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan pendidikan
 - b. Peningkatan angka harapan lama sekolah
 - c. Peningkatan pola hidup dan lingkungan yang sehat
 - d. Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
2. Prioritas 2 : Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian
 - b. Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan
 - c. Peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses berinvestasi

- d. Peningkatan infrastruktur dan pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro (UM)
 - e. Peningkatan pemenuhan standar ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat.
3. Prioritas 3 : Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Dasar Yang Handal, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan dan jembatan
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan irigasi
 - c. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air minum
 - d. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air limbah
 - e. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan drainase
 - f. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana kawasan permukiman kumuh
 - g. Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komunikasi dan internet
4. Prioritas 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup dan Sosial berwawasan lingkungan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan
 - b. Peningkatan dan pemeliharaan mutu lingkungan hidup
 - c. Penurunan angka kemiskinan
 - d. Peningkatan pelayanan dan SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - e. Peningkatan infrastruktur dan SDM tanggap darurat bencana
 - f. Peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan asli daerah.
5. Prioritas 5 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
 - b. Peningkatan nilai evaluasi keuangan pemerintah daerah
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - d. Peningkatan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Pemda
 - e. Peningkatan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
 - f. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
6. Prioritas 6 : Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada yang Jujur Adil dan Demokratis, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Peningkatan dan peliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

- b. Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kerukunan antar umat beragama

Tabel 4.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan pendidikan | 1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah | 8,06 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Program Pendidikan Menengah (SMP) | Dinas Pendidikan |
| | | Peningkatan angka harapan lama sekolah | 2 Angka Harapan Lama Sekolah | 13,41 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Dinas Pendidikan |
| | | | | | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Peningkatan pola hidup dan lingkungan yang sehat | 3 Usia Harapan Hidup (daerah) | 69,28 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Dinas Kesehatan |
| | | Peningkatan mutu dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan | 4 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) | 140 | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak | Dinas Kesehatan |
| | | | | | Program Kesehatan Keluarga | Dinas |

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|--|---|--|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | lanjutan | | | | Kesehatan |
| | | | 5 Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) | 12,30 | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Dinas Kesehatan |
| | | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja | 6 Angka pengangguran terbuka | 2,2 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Disnakertrans Disnakertrans |
| 2 | Meningkatkan Daya Saing Perekonominan Daerah | Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian | 7 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) | 13,39 | Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Dinas Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Hortikultura | Dinas Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | Dinas Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Produktifitas Perkebunan | Dinas Pertanian |
| | | Peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang perdagangan | 8 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 6,18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Dinas Perdagangan |
| | | | | | Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan | Dinas Perdagangan |
| | | Peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses berinvestasi | 9 Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (%) | 5 | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi | Dinas Namdal & PTSP |
| | | | | | Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | Dinas Namdal & PTSP |

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan infrastruktur dan pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro (UM) | 1 0 | Pertumbuhan Usaha Mikro (UM) (%) | 10,50 | Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM | Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian |
| | | Peningkatan pemenuhan standar ketersediaan dan konsumsi pangan masyarakat | 1 1 | Tingkat ketersediaan pangan (PPH) | 85,25 | Program peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Dasar Yang Handal | Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan dan jembatan | 1 2 | Jaringan jalan dalam kondisi mantap (%) | 38,00 | Program Pembangunan Jalan | Dinas PUPR |
| | | Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan irigasi | 1 3 | Jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) | 52,00 | Program Peningkatan Jalan | Dinas PUPR |
| | | Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air minum | 1 4 | Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat (%) | 97,19 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Dinas PUPR |
| | | Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan air limbah | 1 5 | Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar (%) | 96,48 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih | Dinas PUPR |
| | | Peningkatan dan pemeliharaan kualitas | 1 6 | Jaringan drainase dalam keadaan baik (%) | 88,53 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi | Dinas PUPR |

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | jaringan drainase | | | | |
| | | Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasana kawasan permukiman kumuh | 1 7 Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh (%) | 6,00 | Program Penanganan kawasan kumuh | Dinas Perkim |
| | | Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan komunikasi dan internet | 1 8 Cakupan infrastruktur telekomunikasi yang dapat diakses desa terpencil (%) | 50,00 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Dinas Komunikasi & Informatika |
| 4 | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup dan Sosial berwawasan lingkungan | Pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan | 1 9 Nilai Tukar Petani | 98,65 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | Dinas Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura | Dinas Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Dinas Pertanian |
| | | | | | Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan | Dinas Pertanian |
| | | Peningkatan dan pemeliharaan mutu lingkungan hidup | 2 0 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 61,25 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|--|---------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Penurunan angka kemiskinan | 2 1 | Angka Kemiskinan (%) | 4,77 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | | Program Keluarga Harapan | Dinas Sosial |
| | | | | | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya | Bappeda |
| | Peningkatan pelayanan dan SDM Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 2 2 | Angka penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) (%) | 35 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Dinas Sosial |
| | | | | | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | | Program pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Dinas Sosial |
| | | | | | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,PSK,narkoba dan penyakit lainnya) | Dinas Sosial |
| | Peningkatan infrastruktur dan SDM tanggap darurat bencana | 2 3 | Indeks Resiko Bencana (%) | 90 | Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam | BPBD |
| | | | | | Program Pembinaan & Peningkatan Stabilitas Keamanan | BPBD |
| | | | | | Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran Hutan & | BPBD |

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | Peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan asli daerah | 2 4 | Budaya Balangan yang terlestarikan (%) | 100 | Lahan | |
| | | | | | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Dinas Pendidikan |
| 5 | Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah | Peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat | 2 5 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%) | 78,00 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah |
| | | Peningkatan nilai evaluasi keuangan pemerintah daerah | 2 6 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah |
| | | Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 2 7 | Nilai/ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | B(62,2) | Peningkatan Kinerja dan Revitalisasi Otonomi Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | Peningkatan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Pemda | 2 8 | Tingkat Maturitas SPIP Pemda | 3,00 | Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Inspektorat |
| | | Peningkatan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah | 2 9 | Nilai EKPPD Kabupaten Balangan | Sangat tinggi | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah |
| | | Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat | 3 | Indeks Desa Membangun (%) | 0,68 | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | Dinas PMD |

| N o. | Prioritas- Prioritas RKPD | Sub Prioritas | Indikator Kinerja (impact/outcome) | | Target RKPD Tahun 2020 | Program Prioritas | SKPD Penanggung Jawab |
|---------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| | | dan pemerintahan desa | 0 | | | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | Dinas PMD |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Dinas PMD |
| 6 | Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada yang Jujur Adil dan Demokratis | Peningkatan dan peliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat | 3 1 | Angka Pelanggaran Trantibmas | 125 | Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | Dinas Satpol PP |
| | | Peningkatan wawasan kebangsaan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kerukunan antar umat beragama | 3 2 | Angka konflik sosial bernuansa SARA | | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Dinas Satpol PP |
| | | | 0 | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Bakesbangpol |
| | | | | | | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Bakesbangpol |

4.2.1. Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2020 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dan RKP tahun 2020

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021, maka telah dirumuskan Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2020. Prioritas dan Sasaran tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Kabupaten Balangan yang berusaha untuk diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Balangan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintan Kabupaten Balangan sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi dan Daerah.

Prioritas dan Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2020 tersebut juga tidak lepas dari Prioritas Nasional yang pada tahun 2020 ini dijabarkan dalam 5 (lima) Prioritas Nasional serta 4 (empat) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

| No. | Prioritas Nasional | No. | Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan | No. | Prioritas Kabupaten Balangan |
|-----|--|-----|--|-----|---|
| 1. | Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan | 1. | Peningkatan Kualitas SDM | 1. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia |
| 2. | Infrastruktur dan pemerataan wilayah | 3. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas | 3. | Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Dasar Yang Handal |
| 3. | Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja | 2. | Peningkatan Daya Saing Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan | 2. | Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah |
| 4. | Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup | | | 4. | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup dan Sosial berwawasan lingkungan |
| 5. | Stabilitas pertahanan dan keamanan | 4. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 5. | Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah |
| | | | | 6. | Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada yang Jujur Adil dan Demokratis |